



LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2021

Periode :

Untuk Periode Yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2021

2021

Instansi :

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV

Laporan Keuangan Tahunan (Unaudited) 2021

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Badung, 21 Januari 2022
Kepala Kantor



Putu Eka Cahyadi
NIP. 19790415 200212 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan Laporan	v
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	4
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	12
B.1 Pendapatan	
B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	19
C.1 Persediaan	
C.2 Tanah	
C.3 Peralatan dan Mesin	
C.4 Gedung dan Bangunan	
C.5 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.6 Aset Tetap Lainnya	
C.7 Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.9 Aset Tak Berwujud	
C.10 Aset Lain-lain	
C.11 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.12 Utang kepada Pihak Ketiga	
C.44 Ekuitas	
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	26
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2 Beban Pegawai	
D.3 Beban Persediaan	
D.4 Beban Barang dan Jasa	
D.5 Beban Pemeliharaan	
D.6 Beban Perjalanan Dinas	
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.8 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.10 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.11 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.12 Pos Luar Biasa	
D.13 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19	
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	31
E.1 Ekuitas Awal	
E.2 Surplus (Defisit) LD	
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	

- E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
- E.5 Transaksi Antar Entitas
- E.6 Ekuitas Akhir

VI. Lampiran dan Daftar

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Badung, 21 Januari 2022

Kepala Kantor



Putu Eka Cahyadi

NIP. 19790415 200212 1 001

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.540.350.315 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.540.350.315 atau mencapai 51,32 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp4.950.000.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp30.092.997.805 atau mencapai 96,24 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp31.267.332.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp120.703.179.716 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp456.081.708; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp120.247.098.010 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp9.045.000 dan Rp120.694.134.716

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.519.004.316 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp39.919.464.575 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-37.400.460.259, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp-53.020.921 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-37.453.481.180.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 sebesar Rp129.150.868.658, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-37.453.481.180 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar -1.162.752 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 28.997.909.990 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp120.694.134.716

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diwajibkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

DAFTAR TABEL

1	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
2	Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
5	Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
6	Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2021
8	Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
9	Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
10	Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2021
11	Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
12	Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
13	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
14	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
15	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
16	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
17	Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
18	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
19	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
20	Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
21	Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
22	Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
23	Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
24	Rincian Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
25	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
26	Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
27	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2021
28	Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
29	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
30	Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
31	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
32	Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
33	Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
34	Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
35	Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
36	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
37	Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2021
38	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2021
39	Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Unaudited) Tahun 2021
40	Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
41	Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri
42	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
43	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
44	Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan
45	Rincian Hibah Yang Belum Disahkan
46	Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut
47	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

- 48 Rincian Utang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut
- 49 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut
- 50 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
- 51 Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
- 52 Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
- 53 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
- 54 Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
- 55 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
- 56 Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
- 57 Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
- 58 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
- 59 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
- 60 Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
- 61 Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
- 62 Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020
- 63 Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2021 dan 2020
- 64 Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Unaudited) 2021 dan 2020
- 65 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
- 66 Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2021
- 67 Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2021
- 68 Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2021
- 69 Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2021
- 70 Rincian Transfer Keluar Tahun 2021
- 71 Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

U R A I A N	Catatan	TA 2021		% thd Angg	TA 2020 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penanaman Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penanaman Negara Bukan Pajak	B.1.2	4.950.000.000	2.540.350.315	51,32	2.898.254.931
JUMLAH PENDAPATAN		4.950.000.000	2.540.350.315	51,32	2.898.254.931
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	12.895.515.000	12.756.902.738	98,16	12.179.094.945
Belanja Barang	B.2.2	17.371.817.000	16.445.584.467	94,57	12.897.418.687
Belanja Modal	B.2.3	900.000.000	890.530.600	98,95	9.610.643.000
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		31.267.332.000	30.092.997.805	96,24	34.677.156.632

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN	Catatan	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.2	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.2	-	-
Persediaan	C.4	496.081.706	467.589.541
Persediaan yang Belum Diregister	C.5	-	-
Jumlah Aset Lancar		496.081.706	467.589.541
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tunjutan Pemeliharaan/Tunjutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angkutan	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.21	-	-
Tanah Belum Diregister	C.22	-	-
Peralatan dan Mesin	C.23	74.441.626.169	72.144.212.169
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.24	-	-
Gedung dan Bangunan	C.25	98.510.220.312	98.311.652.712
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.26	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.27	730.086.275	730.086.275
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.28	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.29	128.832.000	128.832.000
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.30	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.31	32.081.000	32.081.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.32	(53.565.755.746)	(42.682.888.959)
Jumlah Aset Tetap		120.247.098.010	128.664.004.197
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.33	-	-
Aset Tak Berwujud	C.34	5.719.162.550	6.719.162.550
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.35	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.36	-	-
Dana Cadangan Perawatan RI di Luar Negeri	C.37	-	-
Aset Lain lain	C.39	855.425.000	1.854.759.746
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.39	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.40	(7.374.587.550)	(8.508.600.378)
Jumlah Aset Lainnya		-	85.321.920
JUMLAH ASET		120.703.179.716	129.198.916.858
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.41	-	48.047.000
Utang Yang Belum Diregister	C.42	-	-
Hibah Yang Belum Diregister	C.43	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.44	-	-
Pendapatan Utanma Umuka	C.45	9.045.000	-
Utang Muka dari KPPN	C.46	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.47	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		9.045.000	48.047.000
JUMLAH KEWAJIBAN		9.045.000	48.047.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.48	120.694.134.716	129.150.869.858
JUMLAH EKUITAS		120.694.134.716	129.150.869.858
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		120.703.179.716	129.198.916.858

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2021	2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	2.519.004.316	2.894.879.931
Jumlah Pendapatan		2.519.004.316	2.894.879.931
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	12.710.855.738	12.197.443.945
Beban Persediaan	D.4	530.345.015	369.126.500
Beban Barang dan Jasa	D.5	6.506.091.971	6.179.111.485
Beban Pemeliharaan	D.6	3.271.954.523	2.245.585.015
Beban Perjalanan Dinas	D.7	6.148.680.793	4.025.290.717
Beban Barang Untuk Ciderahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	10.751.536.535	9.879.636.356
Beban Penyisiran Piutang Tak Tenagih	D.11	-	-
Jumlah Beban		39.919.454.576	34.698.174.028
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(37.400.460.259)	(31.801.494.097)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	(53.020.821)	(353.988.120)
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	-	(8.992.580)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(53.020.821)	(360.878.700)
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(37.453.481.180)	(32.162.372.797)
Pos Luar Biasa			
Pendapatan PNPB	D.15	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(37.453.481.180)	(32.162.372.797)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2021	2020
EKUITAS AWAL	E.1	129.150.868.658	127.715.382.793
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(37.453.481.180)	(32.162.372.797)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(1.162.752)	1.594.874.841
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	804.877.629
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	447.618.710
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	(1.162.752)	342.378.302
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		(1.162.752)	1.594.874.841
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	28.997.909.990	32.003.004.021
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(8.456.733.842)	1.435.505.865
EKUITAS AKHIR	E.6	120.694.134.716	129.150.868.658

A. PENJELASAN UMUM**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis**

Dasar hukum Entitas
dan Rencana Strategis

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 21 Tahun 2016 Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Serta Pelaporan Keuangan Berbasis Akual di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
9. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-27/PB/PB.6/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, Penyampaian Laporan Keuangan kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 (Unaudited) serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun

II. KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Berdasarkan PM 41 Tahun 2011 Tanggal 31 Mei 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV adalah mewujudkan serta meningkatkan daya guna dan hasil guna fungsi pemerintahan serta menjamin tersedianya pelayanan pada masyarakat terhadap Bandar Udara di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Tugas utamanya melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap keselamatan, keamanan, kelancaran, serta kenyamanan penerbangan di bandar udara di Otoritas Bandar Udara Wilayah IV berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Penerbangan Nasional dan Internasional yang berlaku. Otoritas Bandar Udara Wilayah IV diharapkan dapat menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Visi dan Misi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV

- a. Visi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV dalam melaksanakan tugasnya yaitu: "Terwujudnya Penyelenggaraan Transportasi Udara Yang Andal, Berdaya Saing Dan Memberikan Nilai Tambah"
- b. Misi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV adalah :
 1. Mewujudkan pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap keselamatan, keamanan, kelancaran, pelayanan dan kenyamanan penerbangan di bandar udara;
 2. Mewujudkan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di bandar udara;
 3. Mewujudkan pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitas, pelayanan dan pengoperasian bandar udara, standar kinerja operasional pelayanan bandar udara, angkutan udara, keamanan penerbangan, pesawat udara dan navigasi penerbangan;
 4. Mewujudkan pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara, pelestarian lingkungan bandar;
 5. Mewujudkan pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP);
 6. Mewujudkan pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang angkutan udara, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara di bandar udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara.

Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- a. Tujuan Mewujudkan penyelenggaraan transportasi udara yang efektif dan efisien yang didukung oleh SDM yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis.

- b. Sasaran Dalam Rencana Strategis Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV yaitu sebagai berikut:
1. Meningkatkan Keselamatan jasa Transportasi Udara di Bandar Udara dalam Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV;
 2. Meningkatkan Keamanan jasa Transportasi Udara di bandar udara dalam wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV;
 3. Meningkatkan Pelayanan jasa Transportasi Udara di bandar udara dalam wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV;
 4. Meningkatkan pemenuhan Standar Tekniks Dan Standar Operasional sarana dan prasarana transportasi udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV;
 5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV;
 6. Meningkatnya optimalisasi pengelolaan Anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV;
 7. Meningkatnya Pengembangan Teknologi Transportasi udara yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim;
 8. Menurunkan dampak Lingkungan bandar udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV.

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV menyelenggarakan fungsi

- a. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap keselamatan, keamanan, kelancaran, serta kenyamanan penerbangan di bandar udara;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di bandar udara;
- c. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitas, pelayanan dan pengoperasian bandar udara;
- d. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara;
- e. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLK) serta Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara;
- f. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan bandar udara, angkutan udara, keamanan penerbangan, pesawat udara dan navigasi penerbangan;
- g. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pelestarian lingkungan bandar udara;
- h. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang angkutan udara, ketidakteraturan dan pengoperasian pesawat udara di Bandar udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi awak pesawat udara serta sertifikasi kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara;
- i. Penerimaan sertifikat kelayakan standar lanjutan (continuous airworthiness certificate) untuk pesawat udara bukan kategori transport (non transport category) atau bukan niaga (non commercial);
- j. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang keamanan penerbangan dan pelayanan darurat di Bandar udara;
- k. Pelaksanaan urusan administrasi dan kemah tanggaa Kantor Otoritas Bandar Udara

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari penikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2021	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	4.950.000.000	4.950.000.000
Jumlah Pendapatan	4.950.000.000	4.950.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	15.946.416.000	12.995.515.000
Belanja Barang	26.590.680.000	17.371.817.000
Belanja Modal	6.416.386.000	900.000.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	48.953.482.000	31.267.332.000

Realisasi Pendapatan
Rp2.540.350.315

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.540.350.315 atau mencapai 51,32 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp4.950.000.000. Pendapatan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.540.350.315. Pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan pada periode Tahun 2021 disebabkan oleh berkurangnya permohonan pembuatan dan perpanjangan untuk PAS, TIM, Stiker bandara yang merupakan pendapatan utama dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	4.950.000.000	2.540.350.315	51,32
Jumlah	4.950.000.000	2.540.350.315	51,32

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami penurunan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 12,29 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.540.350.315	2.898.254.931	(12,29)
Jumlah	2.540.350.315	2.898.254.931	(12,29)

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.540.350.315 dan Rp2.896.254.931. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2021 mengalami penurunan sebesar 12,29 dari TA 2020 Pendapatan jasa kebandarudaraan mengalami penurunan yang diakibatkan oleh pendapatan Jasa Kebandarudaraan dan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan yang mengalami penurunan karena berkurangnya permohonan untuk PAS, TIM, dan Stiker bandara, sedangkan untuk pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan telah berakhir pada bulan April dikarenakan pemungutan dialihkan ke Kanto Pusat sesuai surat nomor AU.101/11/20/DBU-2021 tanggal 8 April 2021 hal Sertifikasi dan Lisensi Personil Bandar Udara. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2.540.350.315	2.896.254.931	(12,29)
Jumlah	2.540.350.315	2.896.254.931	(12,29)

Sedangkan Rincian PNPB Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNPB Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	12.300.999	1.575.000	681,02
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	55.914.316	35.988.931	55,37
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	2.401.275.000	2.671.285.000	(10,11)
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan	28.910.000	176.006.000	(83,57)
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	41.950.000	11.400.000	267,98
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Jumlah	2.540.350.315	2.896.254.931	(12,29)

B.2 Belanja

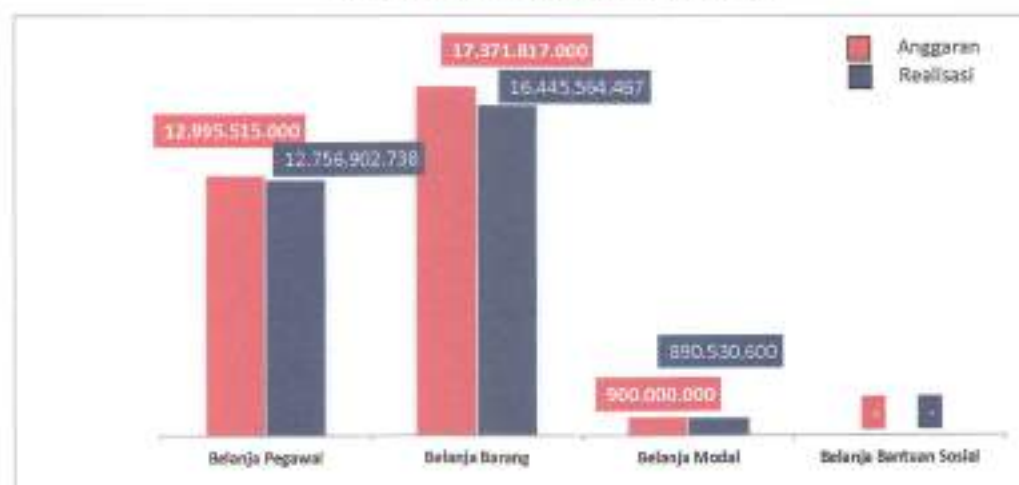
Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp30.092.997.805 atau 96,24 % dari anggaran belanja sebesar Rp31.267.332.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2021

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg
Belanja Pegawai	12.995.515.000	12.756.902.738	98,16
Belanja Barang	17.371.817.000	16.445.564.467	94,67
Belanja Modal	900.000.000	890.530.600	98,95
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	31.267.332.000	30.092.997.805	96,24

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2021



Dibandingkan dengan TA 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar 13,22%. Penurunan belanja signifikan terlihat pada belanja modal yang disebabkan oleh ada penghematan anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sedangkan untuk belanja barang mengalami kenaikan karena pada periode bulan Januari s/d Desember 2021 disebabkan oleh realisasi belanja perjalanan dinas yang meningkat karena pengawasan dan pengendalian bandar udara dilaksanakan di lokasi wilayah kerja Kantor Otoritas Badnar Udara Wilayah IV. Berikut rincian realisasi belanja TA 2021 dan TA 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Pegawai	12.756.902.738	12.179.094.945	4,74
Belanja Barang	16.445.564.467	12.887.418.687	27,61
Belanja Modal	890.530.600	9.610.643.000	(90,73)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	30.092.997.805	34.677.156.632	(13,22)

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp12.756.902.738

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp12.756.902.738 dan Rp12.179.094.945. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,74 % dari TA 2020. Hal ini disebabkan Kenaikan realisasi belanja pegawai diakibatkan oleh adanya pegawai baru sebanyak 5

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Gaji Pokok PNS	3.930.468.960	3.746.809.280	4,90
Belanja Pembulatan Gaji PNS	62.595	60.565	3,35
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	312.445.620	309.680.290	0,89
Belanja Tunj. Anak PNS	88.327.706	81.200.692	8,78
Belanja Tunj. Struktural PNS	85.195.000	105.015.000	(18,87)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Belanja Tunj. PPh PNS	4.491.522	6.102.350	(26,40)
Belanja Tunj. Beras PNS	254.339.040	206.566.020	23,13
Belanja Uang Makan PNS	562.491.000	541.435.000	3,89
Belanja Tunjangan Umum PNS	203.605.000	187.605.000	8,53
Belanja Uang Lembur	-	102.124.000	(100,00)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	7.315.477.152	6.893.760.927	6,12
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	12.756.903.595	12.180.359.124	4,73
Pengembalian Belanja Pegawai	857	1.264.179	(99,93)
Jumlah Belanja	12.756.902.738	12.179.094.945	4,74

Realisasi Belanja
Barang
Rp16.445.564.467

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp16.445.564.467 dan Rp12.887.418.687. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 27,61% dari Realisasi TA 2020.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Terjadi kenaikan pada Belanja Perjalanan Dalam Negeri dikarenakan oleh Pengawasan yang lebih banyak dilakukan pada Wilayah Kerja NTB dan NTT serta kegiatan pengendalian yang mulai dilaksanakan secara tatap muka. Selain itu juga terdapat Belanja Pemeliharaan yang mengalami kenaikan yang signifikan karena melaksanakan pemeliharaan yang tertunda pada tahun anggaran lalu karena tahun anggaran lalu terdapat penghematan anggaran

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Barang Operasional	3.656.902.666	3.136.036.694	16,81
Belanja Barang Non Operasional	1.247.306.225	1.794.895.759	(30,51)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	518.952.680	437.451.480	18,63
Belanja Jasa	1.601.883.080	1.248.179.042	28,34
Belanja Pemeliharaan	3.271.839.023	2.245.565.015	45,70
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	6.148.680.793	4.026.522.217	52,70
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	16.445.564.467	12.888.650.187	27,60
Pengembalian Belanja	-	1.231.500	(100,00)
Jumlah Belanja	16.445.564.467	12.887.418.687	27,61

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp1.150.000.000. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp740.313.014 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2021

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	350.000.000	231.207.015	66,06
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	200.000.000	90.519.000	45,26
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	600.000.000	418.586.999	69,76
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah Belanja	1.150.000.000	740.313.014	64,38

Realisasi Belanja Modal
Rp890.530.600

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp890.530.600 dan Rp9.610.643.000. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar 90,73% dibandingkan TA 2020 disebabkan oleh Penurunan realisasi belanja modal ta 2021 diakibatkan oleh adanya penghematan anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak jadi terlaksana karena anggaran di alokasikan untuk kebutuhan yang lainnya sedangkan pada tahun anggaran 2020 terdapat memiliki Pagu Belanja Modal lebih besar.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	691.963.000	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.567.600	9.578.562.000	(97,93)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	32.081.000	(100,00)
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	890.530.600	9.610.643.000	(90,73)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	890.530.600	9.610.643.000	(90,73)

Realisasi Belanja Modal
Tanah Rp0

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2021 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan oleh Tidak terdapat belanja modal tanah TA 2020.

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp691.963.000

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp691.963.000 dan Rp0, mengalami kenaikan sebesar 0,00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Hal ini disebabkan oleh Belanja modal peralatan dan mesin merupakan belanja modal pengadaan 3 unit pompa air senilai Rp. 45.650.000,00, pekerjaan Perencanaan dan Analisa Optimasi Sistem Penanganan Aliran Air Basement senilai Rp. 49.269.000,00 sesuai SPK nomor 04/SPK-PAB/OTB.WIL.IV/IV/2021 tanggal 28 April 2021, Pengadaan Peralatan Peningkat daya Tahan Tubuh senilai Rp. 198.649.000,00 sesuai SPK Nomor : 11/SPK-FIT/OTB.WIL.IV/VII/2021, Pengadaan dan Pemasangan Sistem Backup Pompa senilai Rp. 198.495.000,00 sesuai SPK Nomor : 27/SPK-SBP/OTB.WIL.IV/X/2021 tanggal 16 Oktober 2021 dan Pengadaan Peralatan Multimedia senilai Rp. 199.900.000,00 sesuai Kontrak Nomor : 39/KTK-MTM/OTB.WIL.IV/XI/2021 tanggal 11 November 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	691.963.000	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	691.963.000	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	691.963.000	-	-

Realisasi Belanja Modal
Gedung dan Bangunan
Rp198.567.600

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp198.567.600 dan Rp9.578.562.000 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 mengalami penurunan sebesar 97,93% dibandingkan Realisasi TA 2020. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang merupakan kegiatan Normalisasi Drainase Aliran Air Tanah sesuai SPK Nomor : 18/SPK-NDA/OTB.WIL.IV/IX/2021 tanggal 8 September 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.567.600	9.578.562.000	(97,93)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	198.567.600	9.578.562.000	(97,93)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	198.567.600	9.578.562.000	(97,93)

Realisasi Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp0

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp32.081.000, mengalami penurunan sebesar 100,00 % dibandingkan Realisasi TA 2020. Hal ini disebabkan Pada tahun 2021 tidak terdapat belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	-	32.081.000	(100,00)
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	32.081.000	(100,00)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	32.081.000	(100,00)

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2020. Hal ini disebabkan Tidak terdapat belanja modal lainnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2021 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2020. Belanja Bantuan Sosial tidak terdapat belanja modal sosial.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Persediaan
Rp456.081.706

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp456.081.706 dan Rp467.589.541. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

Jenis	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020
Barang Konsumsi	441.154.706	452.547.041
Bahan untuk Pemeliharaan	14.927.000	15.042.500
Jumlah	456.081.706	467.589.541

Persediaan tersebut di atas dalam Bahan untuk pemeliharaan ini merupakan cleaning kit untuk pemeliharaan gedung kantor

Tanah Rp0

C.2 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Tanah tersebut. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	-
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
	-
Saldo per 31 Desember 2021	-

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2021

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
Jumlah			-

Penjelasan tentang kondisi Tanah

C.3 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp74.441.625.169 dan Rp72.144.212.169. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	72.144.212.169
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	15.053.752
Pembelian	444.199.000
Transfer Masuk	1.805.450.000
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	2.387.512
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	247.764.000
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	17.441.264
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2021	74.441.625.169
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(49.621.139.105)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	24.820.486.064

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- Saldo awal berupa kekurangan pencatatan pada matras yang merupakan kegiatan interior dan furniture ta 2020 berupa beanbag sebanyak 4 unit senilai Rp. 15.053.748,00.
- Pembelian pompa air sebanyak 3 unit Sesuai dengan kwitansi nomor 10/PD-DPS/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 dan SPK Nomor 11/SPK-FIT/OTB.WIL.IV/VII/2021, Pengadaan Peningkat daya Tahan Tubuh sesuai SPK nomor 11/SPK-FIT/OTB.WIL.IV/VII/2021 dan Pengadaan Peralatan Multimedia Kontrak nomor 39/KTK-MTM/OTB.WIL.IV/XI/2021 dengan nilai masing-masing adalah sebagai berikut :
 - Peralatan Peningkat daya Tahan Tubuh Rp. 198.649.000,00;
 - Pengadaan Peralatan Multimedia Rp. 199.900.000,00;
 - Pompa Submersible Rp. 30.250.000,00;
 - Pompa Submersible Rp. 8.250.000,00;
 - Pompa Air Rp. 7.150.000,00.
- Transfer masuk dari Direktorat Navigasi Penerbangan yang berupa :
 - DME Ground Station Test Set senilai Rp. 38.500.000,00;
 - Digital Spectrum Analyzer senilai Rp. 393.800.000,00;
 - Alat DF Radio VHF senilai Rp. 1.166.000.000,00;
 - Airband Nav-com Transceiver senilai Rp. 7.150.000,00.
 Sesuai dengan BASTO nomor 210/BA/PU/DNP/III/2021 tanggal 03 Maret 2021.
- Koreksi pencatatan nilai/kuantitas adalah transaksi penyesuaian harga satuan pada asset matras yang disesuaikan dengan RAB kontrak kegiatan Interior dan Furniture ta 2020 sebanyak 8 unit senilai Rp. 2.387.512,00.
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP merupakan kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Sistem Backup Pompa sesuai SPK nomor 27/SPK-SBP/OTB.WIL.IV/X/2021 senilai Rp. 198.495.000,00 dan Perencanaan dan Analisa Optimasi Sistem Penanganan Aliran Air Basement sesuai SPK nomor 04/SPK-PAB/OTB.WIL.IV/IV/2021 senilai Rp. 49.269.000,00

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Koreksi pencatatan disebabkan karena kelebihan pencatatan pada asset rak kayu dimana semula dicatat sebanyak 18 unit dengan nilai Rp. 78.485.670,00 menjadi sebanyak 14 unit senilai Rp. 61.044.410,00 dan untuk selisihnya sebesar Rp.17.441.260,00 direkam menjadi asset matras melalui transaksi saldo awal sebanyak 4 unit senilai Rp. 15.053.748,00 dan penyesuaian nilai asset matras sebesar Rp. 2.387.512,00.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.4 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp98.510.220.312 dan Rp98.311.652.712. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	98.311.652.712
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
Pengembangan Nilai Aset	198.567.600
Pengembangan Melalui KDP	-
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	-
Koreksi Kesalahan Input IP	-
Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi	-
Mutasi Kurang:	
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	-
Reklasifikasi Keluar	-
Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi	-
Penghentian Aset Dari Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2021	98.510.220.312
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(3.755.407.061)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	94.754.813.251

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- Mutasi tambah pada aset Gedung dan Bangunan merupakan kegiatan Normalisasi Drainase Aliran Air Tanah sesuai SPK nomor 18/SPK-NDA/OTB.WIL.IV/IX/2021

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.5 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp.730.095.275 dan Rp.730.095.275. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	730.095.275
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	90.099.199
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	90.099.199
	-
Saldo per	730.095.275
Akumulasi Penyusutan s.d.	(198.859.580)
Nilai Buku per	531.235.695

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Mutasi tambah merupakan penggunaan kembali aset berupa jaringan telepon lainnya yang telah dihentikan.

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Mutasi kurang merupakan aset jaringan telepon lainnya yang dihentikan penggunaannya serta dilakukan perubahan kondisi menjadi rusak berat.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp128.832.000

C.6 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp.128.832.000 dan Rp.128.832.000. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	128.832.000
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	-
	-
Saldo per 31 Desember 2021	128.832.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(20.350.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	108.482.000

Mutasi tambah/kurang:

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada aset tetap lainnya.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp32.081.000

C.7 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.32.081.000 dan Rp.32.081.000. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Saldo akhir KDP merupakan kegiatan Perencanaan Pembuatan jalan dan Reinstalasi Jaringan Air Bersih Dilingkungan Perumahan Operasional yang dilaksanakan pada TA 2020, namun pada TA 2020 terdapat penghematan anggaran yang menyebabkan anggaran untuk kegiatan fisik pada perencanaan dimaksud dialokasikan untuk kegiatan lain. Pada TA 2021 dan TA 2022 anggaran fisik tersebut telah coba diusulkan kembali akan tetapi masih belum tersedia. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2021	32.081.000
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	49.269.000
Pengembangan KDP	198.485.000
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	247.764.000
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2021	32.081.000

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp53.595.755.746

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp53.595.755.746 dan Rp42.682.868.959. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2021

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	74.441.625.169	(49.621.139.105)	24.820.486.064
2	Gedung dan Bangunan	98.510.220.312	(3.755.407.061)	94.754.813.251
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	730.095.275	(198.859.590)	531.235.685
4	Aset Tetap Lainnya	128.832.000	(20.350.000)	108.482.000
Akumulasi Penyusutan		173.810.772.756	(53.695.785.746)	120.215.017.010

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Aset Tak Berwujud
Rp6.719.162.550

C.9 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp6.719.162.550 dan Rp6.719.162.550. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV berupa Software Komputer.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2021	6.719.162.550
Mutasi tambah:	-
	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	-
	-
	-
	-
	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2021	6.719.162.550
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2021	(6.719.162.550)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	-

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

- a. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada aset tak berwujud

Aset Lain-lain
Rp655.425.000

C.10 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp655.425.000 dan Rp1.854.759.748. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2021	1.854.759.748
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	90.099.200
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	1.199.334.748
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan	90.099.200
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2021	655.425.000
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	(655.425.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	-

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

- Mutasi tambah merupakan aset jaringan telepon lainnya yang dihentikan penggunaannya setelah dilakukan perubahan kondisi menjadi rusak berat.

Mutasi Kurang

- Mutasi kurang adalah sebagai berikut :
 1. Penghapusan Barang Milik Negara sesuai dengan Surat Keputusan nomor KP/155/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 dengan nilai perolehan BMN yang dihapus adalah sebesar Rp. 1.199.334.748,00 yang berupa 1 paket Peralatan Perkantoran
 2. Penggunaan kembali aset berupa jaringan telepon lainnya yang belum dirubah kondisinya menjadi rusak berat sebanyak 1 unit senilai Rp. 90.099.200,00.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 7.374.587.550

C.11 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp7.374.587.550 dan Rp8.508.600.378. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	6.719.162.550	(6.719.162.550)	-
Aset Lain-lain	655.425.000	(655.425.000)	-
-	-	-	-
Total	7.374.587.550	(7.374.587.550)	-

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0

C.12 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp46.047.000. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A.2020
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	46.047.000
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	46.047.000

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

belanja pegawai berupa belanja uang makan PNS bulan desember yang belum dibayarkan pada TA 2020

Pendapatan Diterima Dimuka
Rp9.045.000

C.45 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp9.045.000 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2020
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	9.045.000	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	9.045.000	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

berasal dari gedung yang disewakan dengan pembayaran di awal kontrak berupa sewa kantin sebesar Rp.21.708.000 selama 1 tahun dimulai sejak 28 Mei 2021.

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.46 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Ekuitas
Rp120.694.134.716

C.13 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp120.694.134.716, dan Rp129.150.868.658. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp2.519.004.316

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp2.519.004.316 dan Rp2.894.679.931. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 12,98. Hal tersebut disebabkan oleh Pendapatan PNPB pada Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan pada Pendapatan Jasa Kebandarudaraan yang diakibatkan oleh berkurangnya permohonan untuk PAS, TIM dan Stiker bandara, sedangkan untuk Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi pemungutan dilaksanakan terakhir pada bulan april dan dialihkan pemungutan pendapatan dimaksud ke Kantor Pusat. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	2021	2020	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	46.869.316	35.988.931,00	30,23
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi	28.910.000	176.006.000,00	(83,57)
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	2.401.275.000	2.671.265.000,00	(10,11)
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	41.950.000	11.400.000,00	267,98
Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana	-	-	-
Jumlah	2.519.004.316,00	2.894.679.931,00	(12,98)

Beban Pegawai
Rp12.710.855.738

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp12.710.855.738 dan Rp12.197.443.945.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2021 sebesar 4,21 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh Kenaikan realisasi belanja pegawai diakibatkan oleh adanya pegawai baru sebanyak 5 orang dan pegawai pindahan sebanyak 2 orang, terhadap pegawai baru sebanyak 5 orang diberikan pembayaran rapel gaji dan tunjangan kinerja. Selain itu Otban 4 mulai bulan oktober merealisasikan gaji untuk Kepala Kantor karena telah ditetapkan Kepala Kantor Definitif. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Gaji Pokok PNS	3.930.468.960	3.745.546.180	4,94
Beban Pembulatan Gaji PNS	61.738	59.486	3,79
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	312.445.620	309.660.290	0,89
Beban Tunj. Anak PNS	88.327.706	81.200.692	8,78
Beban Tunj. Struktural PNS	85.195.000	105.015.000	(18,87)
Beban Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	4.491.522	6.102.350	(28,40)
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	12.710.855.738	12.197.443.945	4,21

Beban Persediaan
Rp530.345.015

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp530.345.015 dan Rp369.126.500

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 43,68 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh Peningkatan beban persediaan diakibatkan oleh peningkatan belanja pada barang penanganan covid seperti masker, handsanitizer, faceshield, dll karena kantor mulai menerapkan WFO sebanyak 75%. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Persediaan konsumsi	530.345.015	369.126.500	43,68
Beban Persediaan bahan baku	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	530.345.015,00	369.126.500	43,68

Beban Barang dan Jasa
Rp6.506.091.971

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.506.091.971 dan Rp6.179.111.495.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 5,29 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh Kenaikan beban barang dan jasa pada periode Tahun Anggaran 2021 dibandingkan Tahun Anggaran 2020 karena meningkatnya biaya pelaksanaan rapid test/PCR pegawai yang disebabkan oleh adanya beberapa pegawai yang positif covid-19 dan menjadi persyaratan untuk melaksanakan perjalanan dinas. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Keperluan Perkantoran	2.328.091.250	2.209.300.701	5,38
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.917.000	3.393.200	(43,50)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	260.360.000	271.320.000	(4,04)
Beban Barang Operasional Lainnya	835.327.401	543.846.891	53,60
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	231.207.015	108.175.902	113,73
Beban Bahan	9.966.000	-	-
Beban Honor Output Kegiatan	985.560.000	1.387.630.000	(28,98)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	251.780.225	378.638.259	(33,50)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	28.627.500	(100,00)
Jumlah	6.506.091.971	6.179.111.495,00	5,29

Beban Pemeliharaan
Rp3.271.954.523

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.271.954.523 dan Rp2.245.565.015.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 45,71 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh Kenaikan beban pemeliharaan pada Tahun Anggaran 2021 dibandingkan Tahun Anggaran 2020 diakibatkan oleh biaya pemeliharaan dan pengelolaan gedung kantor yang kegiatannya dilaksanakan secara kontraktual pada tahun 2021 mulai dijalankan dari bulan Januari dan terdapat penambahan personil dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.994.099.091	1.190.370.700	67,52
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	4.757.500	(100,00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	194.993.700	304.905.600	(36,05)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.082.746.232	745.531.215	45,23
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	115.500	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	3.271.954.523	2.245.565.015	45,71

Beban Perjalanan Dinas
Rp6.148.680.793

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.148.680.793 dan Rp4.025.290.717

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 52,75 persen disebabkan oleh Kenaikan beban perjalanan dinas dapat dilihat pada beban perjalanan biasa yang disebabkan oleh pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan pada lokasi wilayah kerja, sedangkan penurunan pada beban paket meeting dalam kota karena realisasi yang tertunda akibat kebijakan terkait pandemi covid-19 dan meeting banyak dilakukan secara online. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan 2020 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Perjalanan Biasa	5.159.630.793	3.344.868.717	54,26
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	152.600.000	178.150.000	(14,40)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	601.689.000	396.072.000	51,91
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi CO	-	106.200.000	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	234.861.000	-	-
	-	-	-
Jumlah	6.148.680.793,00	4.025.290.717	52,75

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp10.751.536.535

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp10.751.536.535 dan Rp9.679.636.356.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	8.690.408.498	8.465.738.758	2,85
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.015.767.442	1.163.763.655	73,21
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	28.410.000	28.410.000	-
Beban Penyusutan Irigasi	7.137.780	7.137.780	-
Beban Penyusutan Jaringan	9.812.815	9.812.815	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Dig	-	4.773.348	(100,00)
Jumlah Penyusutan	10.751.536.535	9.679.636.356	11,07
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	10.751.536.535	9.679.636.356	11,07

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp-53.020.921

D.8 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-53.020.921 dan Rp-353.986.120

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	12.300.989	1.575.000,00	681
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(65.321.920)	(355.561.120,00)	(82)
Jumlah	(53.020.921,00)	(353.986.120)	(85)

Surplus (Defisit)
Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang Rp0

D.10 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya Rp0

D.11 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp-6.892.580.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	1.713.610,00	(100,00)
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	(6.606.190,00)	(100)
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	-	-	-
Jumlah	-	(6.892.580)	(100,00)

D.12 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

D.13 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Unaudited) 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	231.207.015	108.175.902	113,73
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	28.627.500	(100,00)
Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	418.586.999	90.932.712	360,33
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	4.757.500	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	106.200.000	(100,00)
-	-	-	-
Jumlah	649.794.014,00	338.693.614	91,85

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

Rincian belanja beban penanganan covid-19 terdiri dari, beban barang operasional berupa belanja masker dan suplemen, beban jasa berupa biaya rapid test/PCR dan disinfektan.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp129.150.868.658,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.129.150.868.658,00 dan Rp.127.715.362.793,00

Defisit LO Rp.-
37.453.461.180,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.-37.453.461.180,00 dan Rp.-32.162.372.797,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,00

E.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.804.877.629. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya. Koreksi ini merupakan penyusutan/amortisasi transaksional karena reklasifikasi keluar terhadap aset Bangunan Gedung Kantor Permanen

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset
Rp.0,00

E.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.447.618.710,00. Revaluasi tersebut berasal dari Selisih revaluasi aset diakibatkan oleh perubahan nilai aset dari hasil penilaian kembali yang dilakukan oleh pengelola barang dalam hal ini KPKNL Denpasar

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2021

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Aset Tetap Non
Revaluasi Rp-1.162.752

E.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.-1.162.752 dan Rp.342.378.302. Koreksi ini Koreksi nilai aset tetap non revaluasi merupakan koreksi dari aset gedung dan bangunan serta jalan dan jembatan.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2021

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(1.162.752)
	-
Jumlah	(1.162.752,0)

E.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi ini adalah Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2021

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
-	-
Jumlah	-

E.7 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.28.997.909.990 dan Rp.32.003.004.021. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2021

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagikan ke Entitas Lain	30.092.997.805
Diterima dari Entitas Lain	(2.540.350.315)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	1.445.262.500
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
-	-
Jumlah	28.997.909.990

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.7.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DKEL sebesar Rp 30.092.997.805, sedangkan DDEL sebesar Rp 2.540.350.315

E.7.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2021

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.445.262.500 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Peralatan dan Mesin	Direktorat Navigasi Penerbangan	1.605.450.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Direktorat Navigasi Penerbangan	(160.187.500)
Jumlah		1.445.262.500

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2021 disajikan pada lampiran

Ekuitas Akhir
Rp120.694.134.716

E.8 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.120.694.134.716,00 dan Rp.129.150.888.658,00.